

TANTANGAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ACEH¹

THE CHALLENGES OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN ACEH

Yuda Perwira²

Email: wirayuda121291@gmail.com

ABSTRACT

Human resource is the main capital of development in a region. A reliable human resource is needed to encourage regional development. However, human development always encounter challenges. Aceh Province is one of the provinces in Indonesia that continuously face the challenges of human development when attempting reaching development goals. Thus, this study aims to determine the challenges those may encountered by Aceh government regarding improving the quality of human development in Aceh. This study uses descriptive analysis for secondary data and some literature study. The results indicates that there is a huge disparity of Human Development Index among regions in Aceh. It may be caused by weakness of coordination in human development policy and strategies among regions. In addition, there are three potential threats to human development, one of them is a high poverty rate. Poverty complicates development because it weakens the level of community participation and illustrates low welfare. In addition, the issues of public spending, such as realization, are a huge barrier for human development in Aceh. Therefore, some strategies must be taken immediately to improve the quality of development such as reducing poverty, improving the quality of education, and introducing health promotion models in Aceh.

Keywords: *Human Development, Education, Poverty, Government Expenditure*

ABSTRAK

Sumber daya manusia merupakan modal pembangunan di suatu daerah. SDM yang handal dan sesuai dengan kebutuhan daerah sangat dibutuhkan untuk menggerakkan dan mendorong pembangunan daerah. Akan tetapi, pembangunan manusia selalu menghadapi tantangan. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang menghadapi tantangan pembangunan manusia dalam rangka pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah Aceh dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Aceh. Pendekatan yang dilakukan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder dan melalui studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas Indeks Pembangunan Manusia sangat tinggi antar kabupaten/kota di Aceh. Hal ini menunjukkan pembangunan manusia belum merata dan adanya indikasi koordinasi yang lemah. Selain itu, tiga potensi ancaman pembangunan juga terpetakan yaitu kondisi kemiskinan yang masih tinggi. Kemiskinan mempersulit pembangunan karena melemahkan tingkat partisipasi masyarakat dan menggambarkan kesejahteraan yang rendah. Selain itu,

¹ Naskah diterima 20 September 2017. Direvisi 27 Oktober 2017

² Pascasarjana Administrasi Pendidikan Universitas Syiah Kuala

permasalahan belanja publik yaitu penetapan dan realisasi anggaran menjadi hambatan pembangunan manusia di Aceh. Oleh sebab itu, beberapa langkah harus dimabil segera untuk meningkatkan kualitas pembangunan seperti strategi pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan juga model promosi kesehatan di provinsi Aceh.

Kata kunci: Pembangunan Manusia, Pendidikan, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah

A. PENDAHULUAN

Pembangunan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu pembangunan fisik dan pembangunan manusia. Pembangunan fisik ditandai dengan adanya bangunan-bangunan seperti gedung, jalan, dan jembatan di suatu negara atau daerah. Pembangunan tersebut bertujuan sebagai sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan baik kegiatan ekonomi, sosial, maupun pemerintahan. Sedangkan pembangunan manusia ditandai dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menjalankan pembangunan.

Pembangunan manusia dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan formal atau pendidikan non formal. Pendidikan formal berbentuk pendidikan berjenjang dengan kurikulum yang sistematis. Pendidikan formal langsung di bawah supervisi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Adapun pendidikan non formal dilakukan dengan pemberian pelatihan baik yang disediakan oleh pemerintah atau negara maupun yang bersifat mandiri.

Kualitas pembangunan manusia dapat diukur melalui beberapa indikator. Tingkat pendidikan sering digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di suatu daerah. Pengukuran ini dilakukan dengan melihat rata-rata pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat. Indikator lain yang sering digunakan adalah jumlah tahun yang dihabiskan seseorang di instansi formal. Selain itu, pembangunan manusia juga

dapat dilihat dari tingkat kesehatan. Angka harapan hidup digunakan sebagai indikator yaitu umur rata-rata masyarakat di suatu negara atau wilayah.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang fokus dalam meningkatkan pembangunan manusia. Hal tersebut didorong dengan adanya potensi bonus demografi yang akan terjadi beberapa tahun mendatang. Kondisi struktur penduduk akan sangat menguntungkan ekonomi Indonesia karena struktur penduduk terdiri dari usia produktif, sedangkan usia muda dan sangat tua akan kecil. Pada saat itu, ekonomi Indonesia tidak akan tergantung sumber daya manusia (SDM) luar untuk menggerakkan roda ekonomi, baik untuk UMKM maupun industri. Akan tetapi, salah satu syarat keberhasilan bonus demografi adalah tersedianya SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan ekonomi Indonesia.

Bonus demografi dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat pembangunan. Limpahan SDM usia muda di suatu negara hanya akan membawa manfaat besar bagi ekonomi jika kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan ekonomi negara tersebut. Selain itu, kesehatan juga menjadi tantangan dalam pemanfaatan bonus demografi, optimalisasi SDM hanya bisa dilakukan jika masyarakat memiliki kesehatan yang baik. Sedangkan hambatan pembangunan akan terjadi jika ledakan usia produktif tidak diikuti dengan pertumbuhan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi.

Pengangguran usia produktif akan tercipta dan dapat meningkatkan angka konflik sosial dan kriminalitas. Oleh karena itu, pembangunan manusia harus dilakukan sejak dini sebagai antisipasi permasalahan bonus demografi di Indonesia.

Salah satu provinsi yang menghadapi tantangan pembangunan manusia adalah provinsi Aceh. Sebagai daerah yang rawan bencana dan konflik berkepanjangan, Aceh mengalami perlambatan pembangunan manusia, khususnya sebelum tahun 2005. Konflik keamanan yang terjadi hampir 30 tahun merusak pondasi pembangunan manusia di Aceh. Pendidikan formal maupun informal tidak dapat dijalankan dengan maksimal karena kondisi keamanan yang tidak pasti. Fasilitas pendidikan juga rusak akibat adanya perusakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pasca perdamaian, tantangan pembangunan manusia bergeser dari ancaman keamanan dan keselamatan menjadi ancaman yang lebih global. Tantangan ini semakin meningkat dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang belum diikuti dengan kedewasaan penggunaan teknologi. Arus informasi tidak dapat difilter dengan baik sehingga dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap informasi. Pembangunan manusia semakin menjadi hal krusial mengingat ancaman semakin meningkat.

Walaupun Pemerintah Aceh telah melaporkan keberhasilan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 67,81 pada tahun 2012 menjadi 69,45 pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 1,64 selama rentang waktu 2012-2015 (Bappeda, 2017), nilai tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain. Desentralisasi fiskal dan otonomi khususnya di Aceh seharusnya dapat

menempatkan kualitas pembangunan Aceh masuk ke dalam urutan peringkat atas. Selain itu, angka tersebut juga relatif rendah, khususnya jika dihubungkan dengan kekayaan wilayah dan alokasi fiskal setiap tahunnya.

Penelitian akademis terkait pembangunan di Aceh relatif masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi. Penelitian yang ada lebih banyak mengkaji pendekatan yang lebih mikro untuk menjelaskan kualitas pembangunan di Aceh, seperti pemanfaatan teknik belajar tertentu di sekolah ataupun perguruan tinggi (Djalil dan Megawangi, 2006). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan pembangunan manusia di Aceh. Masalah penelitian ini tantangan apa saja yang dihadapi Pemerintah Aceh dalam pembangunan manusia di Aceh? Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini bertujuan memetakan hambatan pembangunan manusia di Aceh serta mencari strategi yang dapat diambil oleh Pemerintah Aceh.

Penelitian ini dimulai dengan penjelasan pembangunan manusia secara teoritik. Selanjutnya, penjelasan data makro terkait pembangunan manusia dan kemiskinan di Aceh dijelaskan secara komprehensif untuk menggambarkan ketimpangan pembangunan manusia di Aceh. Di akhir tulisan, penelitian ini menggambarkan hambatan-hambatan yang akan dihadapi Pemerintah Aceh dalam pembangunan manusia.

B. STUDI LITERATUR

1. Teori dan Indikator Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia dapat diartikan secara luas maupun sempit. Pembangunan manusia secara luas dapat meliputi kesehatan mental, pelibatan baik pelibatan politik dan kemasyarakatan, kondisi ekonomi, dan beberapa indikator

lainnya (Ranis, Stewart, & Samman, 2006). Adapun sebelas arah pembangunan manusia dapat diperhatikan pada Gambar 1.

Selain indikator di atas, terdapat sebuah indikator yang menggambarkan pembangunan manusia secara menyeluruh yaitu *Human Development Index (HDI)* atau yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan fasilitas lainnya (bps.go.id).

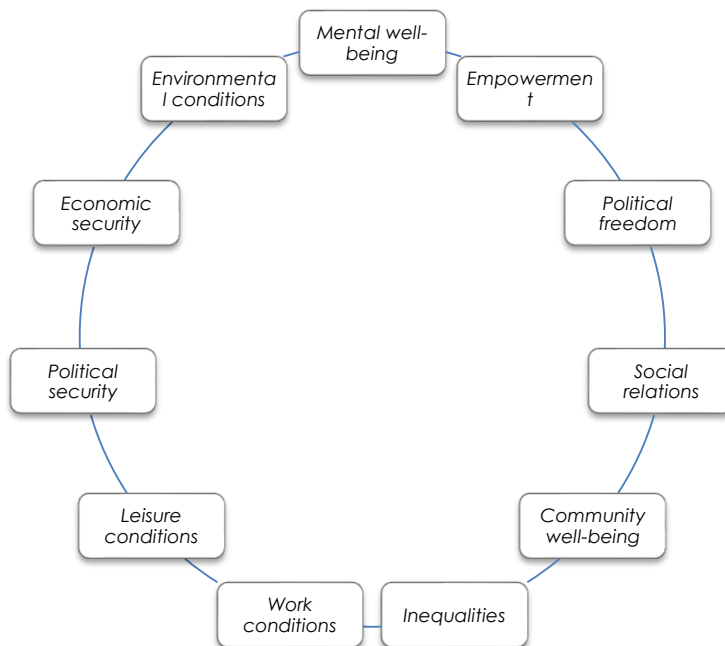
IPM disusun dari komponen pembangunan manusia yang dianggap merupakan dasar pengukuran pembangunan manusia yaitu:

1. Ketahanan Hidup/Usia Hidup (Longevity), diukur dengan harapan hidup pada saat lahir

2. Pendidikan yang dihitung berdasarkan tingkat rata-rata melek huruf dikalangan penduduk dewasa (bobotnya dua pertiga) dan angka rata-rata lama sekolah (bobotnya sepertiga)
3. Kualitas standar hidup yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli dari mata uang domestik dimasing-masing Negara.

2. Desentralisasi dan Pembangunan Manusia

Tantangan pembangunan di Aceh tidak terlepas dari status Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Kabupaten/Kota juga merupakan daerah otonomi sehingga pembangunan manusia di Aceh terdistribusi ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Teori tentang desentralisasi dan pembangunan manusia menjadi penting diangkat agar dapat menggambarkan pola hubungan desentralisasi dan pembangunan manusia.



Gambar 1. Arah Pembangunan Manusia (Ranis, Stewart, & Samman, 2006)

Desentralisasi adalah salah satu kebijakan penting untuk memberantas kemiskinan melalui pembangunan manusia, terutama di negara-negara berkembang (World Bank, 2005). Desentralisasi menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih pro terhadap masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terkait pembangunan manusia, desentralisasi meningkatkan efisiensi penyediaan layanan publik dengan mengurangi kelebihan pasokan barang dan jasa publik dalam kebijakan SDM (Sudhipongpracha & Wongpredee, 2016; Putra, 2017). Selain itu, desentralisasi diyakini sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar (Steiner, 2007).

Hubungan desentralisasi dan pembangunan manusia terkait dengan teori desentralisasi dan kemiskinan. Pengalokasian yang lebih baik dalam desentralisasi memungkinkan pemerintah untuk mengoptimalkan pengeluaran pemerintah. Optimalisasi pengeluaran pemerintah memungkinkan pengurangan penduduk miskin yang lebih cepat karena alokasi sumber daya pemerintah lebih tepat sasaran. Selain itu, desentralisasi juga dapat menciptakan kebijakan dan program kreatif dari pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan di wilayahnya.

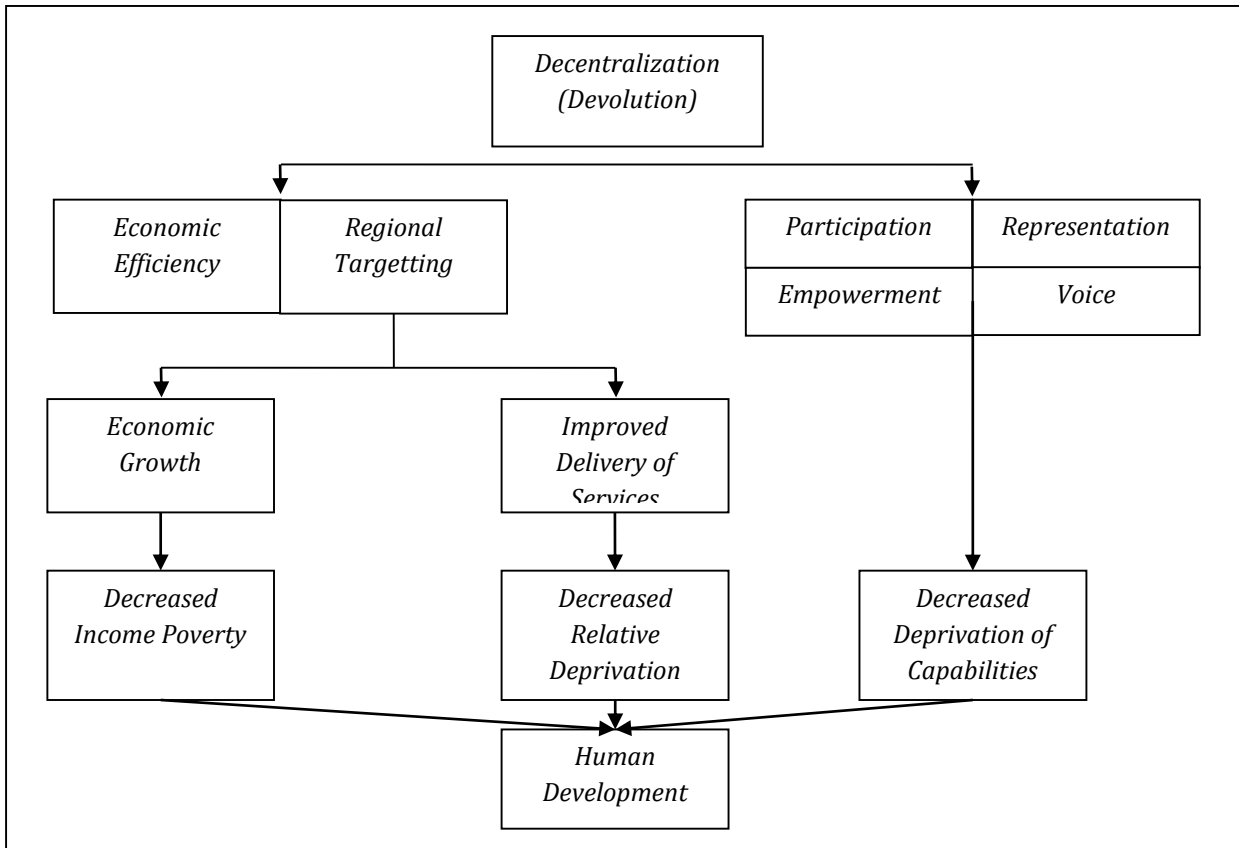
Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan jenis dan jumlah barang publik, maka persyaratannya mungkin mendekati permintaan masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi pada penyediaan

barang publik tercapai. Selain itu, desentralisasi fiskal dapat menumbuhkan dan meningkatkan mata pencaharian bagi masyarakat miskin (Bjornestad, 2009; Sudhipongpracha, 2016).

Khan (2013) mengidentifikasi tiga hubungan potensial antara desentralisasi (devolusi) dan kemiskinan dengan menyusun kerangka konseptual. Pertama, desentralisasi dapat menyebabkan perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan absolut. Kedua, penargetan regional dan efisiensi ekonomi pada saat bersamaan juga dapat meningkat dalam penyediaan layanan publik yang lebih baik. Ketiga, ia menyimpulkan bahwa melalui peningkatan partisipasi dan keterwakilan, desentralisasi dapat memberdayakan orang-orang miskin dan kurang beruntung dalam proses pengambilan keputusan.

3. Pembangunan Manusia di Indonesia

Indonesia akan menghadapi bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan. Struktur masyarakat akan dipenuhi dengan usia muda sehingga ekonomi sudah memiliki sumber daya yang cukup untuk menggerakkan usaha-usaha strategis. Bonus demografi hanya membawa dampak positif jika sumber daya yang ada memiliki kualitas yang tinggi. Menyadari hal ini, Pemerintah Indonesia meningkatkan fokus pembangunan manusia jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rencana tersebut dapat diamati dalam Perpres No. 45 tahun 2016, tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.



Gambar 2. Desentralisasi dan Pembangunan Manusia

Pemerintah Indonesia menetapkan Sumber Daya manusia (SDM) adalah sebagai modal utama dalam pembangunan nasional. Kualitas pembangunan manusia menjadi target pembangunan tahunan dan lima tahunan yaitu dengan menetapkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Beberapa strategi yang dilakukan yaitu dengan pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat (Pemerintah Indonesia, 2014).

Target pembangunan manusia di Indonesia tidak mudah dengan dicapai mengingat luas wilayah dan keberagaman Indonesia. Berdasarkan pemetaan tantangan dalam RPJM 2015-2019, Terdapat beberapa tantangan

pembangunan manusia sebagai berikut (Pemerintah Indonesia, 2014).

1. Tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang

berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin, dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu; serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat.

3. Tantangan dalam rangka memperkuat karakter dan jatidiri bangsa adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal.
4. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan
5. Tantangan dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya adalah merubah sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang toleran terhadap kekerasan dan perlakuan salah lainnya, serta melaksanakan sistem perlindungan perempuan dan anak secara terkoordinasi dan menyeluruh mulai dari upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.

Walaupun terus menghadapi tantangan, nilai IPM Indonesia terus mengalami perbaikan. Pada tahun 2015, IPM mencapai 0,689, menempatkan negara dalam pembangunan manusia kategori “sedang” dan memposisikannya di 113 dari 188 negara dan wilayah. Antara tahun 1990 dan 2015, nilai IPM di Indonesia meningkat dari 0,528 menjadi 0,689, meningkat 30,5 persen (UNDP, 2017). Angka harapan hidup saat kelahiran meningkat 5,8 tahun, rata-rata tahun sekolah meningkat 4,6 tahun dan Tahun-tahun sekolah yang diharapkan meningkat 2,8 tahun. GNI per kapita Indonesia meningkat sekitar 135,4 persen antara tahun 1990 dan 2015.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik yaitu menjelaskan data-data sekunder yang dikumpulkan dari instansi-instansi pemerintah. Variabel yang menjadi fokus penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM digunakan sebagai indikator pembangunan manusia di Aceh. IPM dibangun oleh empat komponen yaitu angka harapan hidup, lama pendidikan, angka melek huruf, dan pendapatan per kapita masyarakat.

Data-data diatas ditabulasi dan diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Selanjutnya, fluktuasi angka akan dijelaskan berdasarkan fenomena di lapangan dan penelitian terdahulu yang membahas kualitas pembangunan manusia di Aceh. Selain itu, disparitas pembangunan antar kabupaten/kota di Aceh juga dimunculkan dalam tabel sehingga terlihat ketimpangan pembangunan manusia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Ketimpangan Pembangunan Manusia antar Kabupaten/Kota di Aceh

Keberhasilan pembangunan di Aceh, begitu juga dengan kegagalan, tidak terlepas dari keberhasilan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi kabupaten/kota di Aceh. Pembangunan manusia di masing-masing kabupaten/kota di Aceh merupakan bagian integral dalam pembangunan Aceh. Secara umum, pembangunan manusia di Aceh yang telah dilakukan selama ini telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun kenyataannya masih terdapat kesenjangan antar wilayah. Salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan proses pembangunan adalah tingkat IPM masing-masing kabupaten/kota di Aceh.

Berdasarkan perhitungan BPS Aceh, angka IPM di kabupaten/kota di Aceh sangat bervariasi. Dari 23 kab/kota, hanya 9 yang nilainya di atas rata-rata

Provinsi yaitu 70,00. IPM tertinggi dimiliki Kota Banda Aceh yaitu 83,73 persen sedangkan IPM terendah terjadi pada Kabupaten Subulussalam yaitu hanya 62,18. Walaupun adanya perbedaan, secara umum, nilai IPM di kab/kota di Aceh relatif meningkat sejak tahun 2014 hingga 2016 (lihat Tabel 1).

Perbedaan IPM antar kabupaten/kota tidak terlepas dari ketimpangan pembangunan antar daerah di Aceh. Kota Banda Aceh, sebagai ibu kota provinsi, mengalami peningkatan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, khususnya yang berada di wilayah barat. Selain ekonomi, disparitas IPM ini juga berkaitan dengan distribusi SDM. Daerah yang memiliki IPM rendah cenderung didominasi oleh pekerja-pekerja sektor pertanian. Sedangkan daerah wisata dan jasa keuangan, seperti Banda Aceh didominasi oleh pekerja dengan pendidikan formal yang tinggi.

Tabel 1. IPM Kab/Kota di Aceh

No	Kab/Kota	2016	2015	2014	No	Kab/Kota	2016	2015	2014
1	Banda Aceh	83,73	83,25	82,22	13	Aceh Tenggara	67,48	66,77	65,9
2	Lhokseumawe	75,78	75,11	74,44	14	Aceh Tamiang	67,41	67,03	66,09
3	Langsa	75,41	74,74	73,81	15	Nagan Raya	67,32	66,73	65,58
4	Sabang	73,36	72,51	71,5	16	Aceh Utara	67,19	66,85	65,93
5	Aceh Tengah	72,04	71,51	70,96	17	Aceh Singkil	66,96	66,05	65,27
6	Aceh Besar	71,75	71,7	71,06	18	Aceh Timur	65,42	64,55	63,57
7	Bener Meriah	71,42	70,62	70,00	19	Aceh Barat Daya	64,57	63,77	63,08
8	Pidie Jaya	71,13	70,49	69,89	20	Gayo Lues	64,26	63,67	63,34
9	Bireuen	70,21	69,77	68,71	21	Aceh Selatan	64,13	63,28	62,35
10	Aceh Barat	69,26	68,41	67,31	22	Simeulue	63,82	63,16	62,18
11	Pidie	69,06	68,68	67,87	23	Subulussalam	62,18	61,32	60,39
12	Aceh Jaya	67,7	67,53	67,3	Aceh		70	69,45	68,81

Sumber: aceh.bps.go.id, 201

Tabel 2. Komponen IPM Kab/Kota di Aceh Tahun 2013

Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (Persen)	Rata - rata lama sekolah (Tahun)	Pengeluaran perkapita disesuaikan (1000)	IPM
Banda Aceh	71,72	99,39	12,27	643,83	81,84
Lhokseumawe	72,03	99,69	10,67	641,23	74,13
Langsa	71,23	99,36	10,6	613	73,4
Sabang	71,89	99,14	10,63	636,22	71,07
Aceh Besar	71,17	97	9,86	619,61	70,61
Aceh Tengah	70,26	98,98	9,77	628,15	70,51
Bener Meriah	68,04	98,94	8,98	617,52	69,74
Pidie Jaya	69,76	95,54	8,75	634,12	69,26
Aceh	69,4	97,04	9,02	621,4	68,3
Bireuen	72,63	98,55	9,31	603,75	68,23
Pidie	70,34	96,32	8,75	622,8	67,59
Aceh Jaya	68,53	95,67	8,77	607,36	66,92
Aceh Barat	70,55	95,12	8,81	610,22	66,86
Aceh Tamiang	68,75	98,38	8,89	610,37	65,56
Aceh Tenggara	69,69	98,08	9,38	609,76	65,55
Aceh Utara	70,26	97,87	9,26	616,46	65,36
Nagan Raya	70,26	92,12	8,4	615,23	65,23
Aceh Singkil	65,58	96,27	7,83	620,4	64,87
Aceh Timur	70,26	98,33	8,58	599,27	63,27
Gayo Lues	67,62	88,19	8,76	610,93	63,22
Aceh Barat Daya	67,78	96,51	8,35	628,41	62,62
Aceh Selatan	67,54	96,6	8,51	616,71	62,27
Simeulue	63,32	99,79	8,97	628,09	61,68
Subulussalam	66,63	96,57	7,66	624,12	60,11

Sumber: aceh.bps.go.id, 2017

Ketimpangan IPM antar kab/kota di Aceh terjadi karena keempat komponen pembentuk IPM juga terjadi ketimpangan. Angka harapan hidup, misalnya, memiliki perbedaan yang relatif tinggi antar kabupaten/kota di Aceh. Bireun, Lhoksemawe, dan Kota Banda Aceh memiliki angka tertinggi yaitu lebih besar

dari 71,00 tahun. Nilai tersebut relatif jauh dari AHH provinsi Aceh yang hanya 69,4 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Aceh relatif tidak merata (lihat Tabel 2).

Capaian keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya tergantung dari fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

antar daerah di Aceh, tetapi juga sosioekonomi masyarakat. Wilayah yang mengandalkan sektor pertanian, seperti Aceh Timur dan Singkil, cenderung memiliki pembangunan kesehatan yang rendah. Jenis pekerjaan dan lingkungan menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan, disamping kemampuan mengkonsumsi makan sehat akibat rendahnya pendapatan.

Walaupun ketimpangan AHH tinggi, ketimpangan pengeluaran tidak begitu besar di Aceh. Rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat Aceh sebesar 621,4 ribu dengan angka tertinggi di Kota Banda Aceh yaitu 643,83 ribu dan terendah Aceh Timur yaitu 599,27 ribu.

2. Tantangan Pembangunan Manusia di Aceh

Pembangunan manusia di Aceh tidak dapat dipisahkan dari kondisi makro ekonomi Aceh. Lingkungan ekonomi makro yang kondusif dapat mendorong pertumbuhan positif pembangunan manusia, seperti kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, terdapat tiga kondisi makro yang akan menjadi tantangan pembangunan di Aceh yaitu

kemiskinan, pengeluaran pemerintah, dan kebijakan kesehatan. Selain itu, perkembangan narkoba dan teknologi informasi juga tidak dapat dipisahkan terhadap tantangan pembangunan di Aceh mengingat arus informasi dapat juga membawa perkembangan negatif bagi masyarakat di Aceh.

Kemiskinan yang tidak kunjung membaik.

Salah satu tantangan keberhasilan pembangunan manusia di Aceh yaitu kemiskinan. Permasalahan sosial di Aceh yang menjadi sorotan publik adalah kemiskinan dan pengangguran. Jumlah penduduk miskin di Aceh masih sangat tinggi walaupun persentasenya cenderung menurun. Penduduk miskin di Aceh pada tahun 2012 sebesar 21,97 persen menjadi 19,44 persen pada tahun 2015 atau menurun sebesar 2,53 persen (rata-rata penurunan hanya sebesar 0,84 persen). Penduduk miskin Aceh dekonsentrasi di pedesaan yaitu sebesar 19,46 persen (2012) dan 17,08 persen (2015). Sementara, penduduk miskin di perkotaan hanya sebesar 13,07 persen (2012) dan 11,13 persen (2015) di perkotaan (BPS Aceh, 2017).

Tabel 3. Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Aceh (persen)

No	Kab/Kota	2015	2014	No	Kab/Kota	2015	2014
1	Banda Aceh	7,72	7,78	13	Aceh Barat Daya	18,25	17,99
2	Langsa	11,62	12,08	14	Aceh Utara	19,2	19,58
3	Lhokseumawe	12,16	11,93	15	Nagan Raya	20,13	20,85
4	Aceh Selatan	13,24	12,79	16	Subulussalam	20,39	19,72
5	Aceh Tamiang	14,57	14,58	17	Simeulue	20,43	19,92
6	Aceh Tenggara	14,91	13,75	18	Pidie	21,18	20,29
7	Aceh Timur	15,85	15,88	19	Pidie Jaya	21,4	21,78
8	Aceh Besar	15,93	16,13	20	Aceh Barat	21,46	22,97
9	Aceh Jaya	15,93	16,52	21	Bener Meriah	21,55	22,45
10	Bireuen	16,94	16,94	22	Aceh Singkil	21,72	17,77
11	Aceh Tengah	17,51	16,99	23	Gayo Lues	21,95	21,43

12 Sabang	17,69	17,02	Aceh	17,08	18,05
-----------	-------	-------	------	-------	-------

Sumber: aceh.bps.go.id, 2017

Tingkat keparahan kemiskinan di Aceh juga berbeda-beda. Sampai dengan tahun 2016, kabupaten Gayo masih menempati urutan pertama kabupaten termiskin di Aceh yaitu 21,86 persen, selanjutnya Aceh Singkil (21,60), Bener Meriah (21,43), Pidie (21,25) dan Pidie Jaya (21,18) (www.acehtrend.co). Hal ini menunjukkan ketimpangan kemiskinan yang cukup besar karena Kota Banda Aceh hanya memiliki persentase kemiskinan di bawah 10 persen yaitu sekitar 7 persen.

Kemiskinan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program yang dijalankan pemerintah. Dorongan untuk bekerja lebih lama menyebabkan sulitnya masyarakat miskin diajak untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan. Pelatihan, salah satu bentuk program pembangunan manusia, membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga terkadang hanya beberapa masyarakat miskin yang bersedia terlibat dalam program tersebut.

Hubungan kemiskinan dengan pembangunan manusia dibuktikan secara kuantitatif oleh Suradi (2007) yang berjudul *Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Kesejahteraan*. Hasil penelitiannya menemukan partisipasi berperan penting di dalam pembangunan manusia. Partisipasi memungkinkan pembangunan manusia dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Ginting dkk (2008) dengan judul penelitian *Pembangunan Manusia di Indonesia* menemukan bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia akan menurunkan indeks pembangunan manusia.

Oleh sebab itu, kemiskinan akan sangat sulit mendorong partisipasi

masyarakat dalam pembangunan manusia di Aceh. Partisipasi tidak mungkin dapat ditingkatkan jika kondisi kemiskinan masih tinggi. Kualitas partisipasi semakin buru pada kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Permasalahan Pengeluaran Pemerintah Aceh

Pengeluaran pemerintah menjadi instrumen intervensi pembangunan manusia di suatu daerah. Alokasi yang tepat akan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan seperti permasalahan pembangunan manusia. Kondisi kesehatan, misalnya, dapat ditingkatkan dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat. Tidak hanya membangun fasilitas kesehatan, tetapi juga tenaga medis. Selain pengeluaran kesehatan, pengeluaran dalam bidang pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi juga harus ditingkatkan guna meningkatkan kualitas masyarakat.

Alokasi pembangunan Aceh cenderung kurang mendukung pembangunan manusia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2016) membuktikan bahwa hanya pengeluaran pemerintah Aceh sektor kesehatan yang memiliki pengaruh terhadap IPM Aceh, sedangkan pengeluaran infrastruktur dan pendidikan tidak menunjukkan hubungan yang positif terhadap peningkatan IPM.

Selain jenis pengeluaran, permasalahan pengeluaran pemerintah Aceh dalam pembangunan dapat dibagi dua yaitu proses pengesahan dan realisasi anggaran. Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) sering menjadi polemik tahunan yang mengganggu penyediaan barang publik dan pergerakan ekonomi Aceh. Keterlambatan pengesahan APBA

bukanlah hal yang baru terjadi, sejak 2004 fenomena ini telah ada. Pihak legislatif maupun eksekutif sepertinya kurang serius dalam menciptakan pengelolaan anggaran yang disiplin waktu. Padahal, keterlambatan pengesahan APBA merupakan suatu pelanggaran sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Setiap daerah diharapkan telah mengesahkan APBD satu bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

Pada 2017, APBA mengalami keterlambatan yaitu baru disahkan pada 30 Januari 2017. Pengesahan yang terlambat juga terjadi pada tahun 2007 yaitu APBA baru disahkan pada akhir Juni 2007. Sedangkan pada tahun 2004, pengesahan APBA dapat dilakukan pada bulan April 2004. Akibatnya, Pemerintah Aceh belum bisa melakukan action plan pembangunan sejumlah proyek dan program pembangunan selama setahun anggaran. Selain permasalahan keterlambatan pengesahan, serapan APBA juga cenderung relatif lambat. Pada tahun 2017, hingga pertengahan Agustus, realisasi APBA baru hanya sebesar 40 persen. Penyerapan tersebut relatif sangat rendah mengingat sisa waktu yang tersedia hanya sekitar empat bulan lagi. Banyak kalangan yang mengkhawatirkan manfaat APBA terhadap kesejahteraan rakyat jika keterlambatan ini terus berulang.

Keterlambatan pengesahan dan reliasasi dapat memperlambat pembangunan manusia di Aceh. Pelayanan kesehatan, sebagai variabel utama, dapat terganggu dengan adanya permasalahan pengesahan APBA. Pelayanan kesehatan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan Kesehatan yang Lebih Bersifat Kuratif

Salah satu tantangan pembangunan manusia di Indonesia adalah kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih menekankan pendekatan kuratif. Pendekatan kuratif lebih bersifat penyelesaian kondisi pasien ketika sudah mengalami permasalahan kesehatan. Pendekatan kuratif kurang memperhatikan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif dan promotif. Akibatnya, pola kesehatan masyarakat tidak berubah yaitu tetap menangani masalah kesehatan ketika masalah sudah datang.

Pembangunan di Aceh relatif masih memandang pendekatan kuratif sebagai pendekatan terbaik dalam penanganan kesehatan di Aceh. Peningkatan pengeluaran sektor kesehatan lebih besar terhadap penanganan kasus-kasus kesehatan masyarakat, bukan preventif kesehatan. Kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), misalnya, menekankan pemerintah sebagai penjamin pembiayaan dan bertanggung jawab terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Pemberian *full coverage* terhadap fasilitas kesehatan dapat membawa perilaku kesehatan yang menyimpang karena adanya keyakinan penanganan yang menyeluruh oleh Pemerintah Aceh.

Kebijakan *full coverage* seperti yang digunakan pada masa JKA dan akan disempurnakan pada kebijakan JKA plus dapat membebankan keuangan daerah dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, penerapan kebijakan *full coverage* harus diikuti dengan kebijakan promotif dan preventif untuk mencegah penyimpangan perilaku masyarakat yang dapat melemahkan kemandirian fiskal di Aceh. Promotif, preventif, dan kuratif harus dapat dibangun secara bersamaan guna menciptakan kebijakan kesehatan daerah yang kuat.

Selain ketiga tantangan pembangunan manusia di Aceh, terdapat masalah lain seperti ancaman perkembangan akses informasi di Aceh. Perkembangan informasi dan teknologi menjadi modal sekaligus juga ancaman pembangunan. Permasalahan informasi dan teknologi di Aceh relatif sama dengan yang dihadapi provinsi lain atau nasional. Salah satu masalah yang sering muncul adalah penyebaran berita palsu atau *hoax* yang bertujuan mengganggu keamanan dan kerukunan beragama. Selain itu, *hoax* juga sering ditujukan untuk memfitnah kinerja pemerintah dengan tujuan menurunkan kepercayaan dan dukungan publik. Hal tersebut biasanya diikuti dengan penyusupan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila atau ajakan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan umum.

Ancaman pembangunan manusia di Aceh tidak terlepas dari ancaman radikalisme dan terorisme yang tersebar melalui internet. Ancaman tersebut terbuka besar karena peningkatan akses internet oleh masyarakat, baik di kota maupun di desa, meningkat tajam. Peningkatan akses ini belum diikuti dengan kemampuan memilih dan memilah dengan bijak sehingga segala bentuk ancaman teknologi informasi dapat dengan mudah menyebar di masyarakat.

3. Strategi Pembangunan SDM

Strategi pembangunan manusia di Aceh dapat dilakukan dengan mengambil kebijakan makro ekonomi maupun kebijakan yang langsung terkait dengan peningkatan kompetensi SDM. Pada tatanan makro, pembangunan manusia dilakukan dengan memperbaiki kondisi makro ekonomi seperti kebijakan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja.

Strategi Pengurangan Kemiskinan

Permasalahan kualitas sinergitas pembangunan sosial dapat dilihat dari dua permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Tingkat kemiskinan provinsi Aceh masih berada di angka 16,73 persen pada periode 2016 dan meningkat pada periode Maret 2017 menjadi 16,89 persen (www.acehtrend.co). Angka tersebut menunjukkan belum terjadi perbaikan kondisi sosial khususnya kemiskinan di Aceh pada tahun 2017. Selain itu, kemiskinan di Aceh lebih banyak terjadi di pedesaan sehingga kompleksitas penanganan kemiskinan semakin tinggi.

Kemiskinan di Aceh paling tidak didorong oleh empat faktor yaitu rendahnya investasi, kemandirian desa, kualitas program kemiskinan, dan bencana alam. Adanya peningkatan fiskal di level desa belum terbukti mampu meningkatkan ekonomi desa karena kemampuan desa dalam mengelola dana desa masih sangat rendah khususnya di desa-desa yang jauh dari perkotaan. Seharusnya, dana desa dapat menjadi alternatif peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat desa disaat investasi lesu. Pembangunan UMKM harus dapat didorong dengan adanya dana desa. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) seharusnya mampu berperan dalam pengentasan kemiskinan di desa.

Beberapa langkah yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengawasan program dan dana desa harus ditingkatkan, begitu juga dengan aktor yang terlibat. Program yang disusun harus disinkronkan dengan program kabupaten, sehingga pembangunan desa dan program kemiskinan dapat berjalan beriringan.

2. Pengembangan produk lokal. Pemerintah Aceh melalui Bappeda Provinsi dan Kabupaten/kota harus membantu pengembangan produk unggulan di setiap desa. Produk tersebut nantinya akan menjadi pendorong usaha mikro di setiap desa sehingga pendapatan masyarakat desa dapat meningkat dan tenaga kerja dapat terserap.
3. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus membangun sistem pengaduan berbasis masyarakat yang dapat dengan mudah digunakan oleh masyarakat. Mekanisme pengaduan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa dapat menurunkan penyelewengan dan desa sehingga optimalisasi dana desa terhadap kemiskinan dan pengangguran meningkat.

Strategi Efektivitas Pengeluaran Pemerintah

Penetapan APBA dan Di tahun 2017, realisasi APBA Aceh hingga 6 September hanya sebesar 47.17%. Nilai ini tentunya sangat jauh dari perencanaan ideal sebuah belanja publik daerah. Jika tidak diselesaikan, permasalahan APBA dikhawatirkan akan meningkatkan ancaman pembangunan di Aceh seperti menurunkan kepercayaan publik. Konflik pengesahan anggaran yang menyebabkan keterlambatan realisasi APBA dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Aceh. Akibatnya, dukungan terhadap pembangunan di Aceh dapat menurun. Selain itu,

Oleh sebab itu, upaya sinergitas dalam penyelesaian permasalahan APBA harus segera diambil. Salah satu strategi yaitu dengan peningkatan peran Bappeda Aceh. Sebagai instansi utama dalam koordinasi perencanaan, Bappeda merupakan instansi utama yang

bertanggungjawab dalam menjaga sinergitas, sistematis, serta efektifitas dan efisiensi perencanaan. Dengan demikian, Bappeda wajib memiliki kemampuan untuk mengelola seluruh elemen perencanaan daerah yaitu pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, fokus pada arah dan tujuan yang ditetapkan, tepat waktu dan sistematis perencanaan agar berjalan dengan baik. Dengan demikian, Bappeda merupakan motor utama penggerak perencanaan pembangunan daerah.

Pentingnya peran Bappeda ini direpresentasikan dengan pemberian wewenang-wewenang utama dalam proses dan produk kunci perencanaan dalam berbagai peraturan terkait perencanaan pembangunan. Wewenang kunci dalam proses perencanaan yang dipegang Bappeda dalam PP no 8 2008 antara lain proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan koordinasi lintas SKPA dalam proses penyusunan rencana. Selain itu, Bappeda juga terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi pembangunan yang bertugas dalam menjaga efektifitas perencanaan sesuai arah dan tujuan perencanaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Selain kedua strategi pembangunan manusia pada level makro, terdapat tugas opsi kebijakan yang harus diambil dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Aceh. Adapun beberapa strategi yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan di Aceh harus menasar ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, Safri (2017) menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan di Aceh tentu tidak bisa dipisahkan dengan tersedianya kualitas guru yang baik. Guru efektif tentu harus

memiliki beberapa kompetensi sesuai dengan perundang-undangan, yaitu: kompetensi profesional, personal, sosial, dan kompetensi pedagogik. Keempat kompetensi ini merupakan standar tinggi-rendahnya mutu guru.

Pemerintah harus memastikan dan menjamin--tentu melalui lembaga terkait-- bahwa mutu para pendidik di Aceh memenuhi standar tersebut. Ini penting mengingat mutu pendidikan Aceh masih mendapat kritikan dari para *stakeholder* dan masyarakat pada umumnya, dan pada kenyataannya masih banyak guru yang gagal dalam ujian kompetensi guru (Safri, 2017).

2. Penguasaan teknologi informasi (TI)
Penguasaan TI merupakan kunci pokok bagi tenaga kerja untuk berkiprah di era global yaitu dunia kerja. Penguasaan teknologi dan informasi memungkinkan seseorang untuk mengakses perkembangan informasi terkini yang berkembang sekaligus menjadi pelaku di dunia bisnis. Oleh sebab itu, membangun SDM di daerah harus menyertakan pembangunan kompetensi TI. Pemanfaatan TI yang tidak hanya di industri tapi sudah ke pertanian mengharuskan Pemerintah Aceh untuk mengembangkan penguasaan modul TI bagi SDM, tidak hanya yang menysasar pekerjaan di industri tetapi juga sektir pertanian dan perikanan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Aceh telah berhasil meningkatkan IPM Provinsi Aceh dalam jangka selama periode 2014-2016. Akan tetapi prestasi tersebut tidak diikuti di setiap kabupaten/kota di Aceh. Terdapat ketimpangan pembangunan IPM antar

kabupaten/kota di Aceh yang mengindikasikan kurangnya koordinasi pembangunan lintas daerah di Aceh. Beberapa tantangan makro yang dihadapi dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu tantangan kondisi kemiskinan yang masih buruk, pengelolaan anggaran yang masih kurang efektif dan tepat waktu, dan tantangan pembangunan kesehatan yang masih menekankan pendekatan kuratif dibandingkan promotif atau preventif.

Tulisan ini merekomendasikan perlu adanya penyelesaian kemiskinan dengan beberapa pendekatan seperti optimalisasi dana desa dan peningkatan investasi di Aceh. Sedangkan upaya perbaikan belanja publik dapat dilakukan dengan optimalisasi peran Bappeda Aceh sebagai koordinator dan pintu akhir usulan dan monitoring dalam pengelolaan belanja publik di Aceh. Selain itu, perlu adanya peningkatan kompetensi SDM Aceh seperti peningkatan mutu pendidikan dan penguasaan TI.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Bjornestad, L. (2009). *Fiscal Decentralization, Fiscal Incentives, And Pro-Poor Outcomes: Evidence From Vietnam*. ADB Economics Working Paper Series, 168(168), 1-54.
- Djalil, Sofyan A. dan Megawangi, Ratna (2006). *Peningkatan Mutu Pendidikan di Aceh melalui Implementasi Model Pendidikan Holistik Berbasis Karakter*. Makalah Orasillmiah pada Rapat Senat Terbuka dalam Rangka Dies Natalis ke 45 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2 September 2006.
- Ginting, Charisma K.S. 2008. *Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia*. Tesis (tidak publikasi). Sekolah Pasca Sarjana Medan: Universitas Sumatera Utara.

- Inovasi, M., Pemerintah, D. I., & Dan, H. (2017). Innovation in government: barriers and strategies 1 mendorong inovasi di pemerintah: hambatan dan strategi, (August).
- Putra, H. S. (2017). The Linkage of Intergovernmental Transfer and Poverty in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 9(1), 29-40. <http://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.29-40>
- Putra, H. (2017). Determinants of Vote Buying in Local Head Election in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 9(2), 205-218. <http://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.205-218>
- Khan, S. A. (2016). International Review of Public Administration Decentralization and Poverty Reduction: A Theoretical Framework for Exploring the Linkages Exploring The Linkages. *International Review of Public Administration*, 18:2, 145-172. <https://doi.org/10.1080/12294659.2013.10805256>
- Ranis, G., Stewart, F., & Samman, E. (2006). Human Development: Beyond the Human Development Index. *Journal of Human Development*, 7(3), 323-358. <http://doi.org/10.1080/14649880600815917>
- Safitri, I. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, vol.1, no.1, hal.66-76
- Steiner, S. (2007) Decentralisation and poverty: conceptual framework and application to Uganda. *Public Administration and Development*, 27, pp. 175-85.
- Sudhipongpracha, T., & Wongpredee, A. (2016). Fiscal decentralization in comparative perspective: Analysis of the intergovernmental grant systems in Indonesia and Thailand. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 1-17. <https://doi.org/10.1080/13876988.2016.1138659>
- Suradi. 2007. "Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 12, No 03, hal 1-11.
- UNDP (2017). Laporan Pembangunan Manusia 2016: Ringkasan Indonesia. Diakses 1 November 2017 melalui: <http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html>
- World Bank Institute, 2005. *Introduction to Poverty Analysis*. Book. Retrieved from [worldbank.org/PGLP/Resources/PovertyManual.pdf](http://www.worldbank.org/PGLP/Resources/PovertyManual.pdf)
- <http://www.acehtrend.co/peringkat-kemiskinan-di-aceh-versi-ideas/>
- Sumber data:
bps.go.id
bps.aceh.go.id